



# **RENCANA KERJA (RENJA)**



**PROGRAM DAN KEGIATAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
TAHUN 2019**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN BOALEMO**

*Jln. Rasjid P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan *Tahun 2019* ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Rencana Kerja merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran tanpa menutup kemungkinan di suatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Boalemo khususnya di Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, masih terdapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan *Tahun 2019* ini selanjutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* ini, diharapkan apa yang dituangkan didalamnya dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2019.

Sekian dan terima kasih

Tilamuta, Januari 2019

**Plt. KEPALA BADAN**

**AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si**

Pembina, IV/a

NIP. 19740314 200312 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	8
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .....	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	10
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	11
3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi .....	12
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	13
3.4 Program dan Kegiatan.....	13
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...</b>	15
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	16
<b>LAMPIRAN</b> <i>Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-C.32 dan Tabel T-C.33</i>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja BKD-DIKLAT adalah dokumen perencanaan BKD-DIKLAT untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja BKD - DIKLAT merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan BKD - DIKLAT khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja BKD - DIKLAT memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja BKD - DIKLAT merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja BKD - DIKLAT berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja BKD - DIKLAT sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Rencana Kerja BKD - DIKLAT 2019 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 yang merupakan dokumen perencanaan tahun kedua 2017 - 2022 yang masuk dalam perodesasi RPJPD tahun 2011-2025.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* seharusnya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Olehnya dalam penyusunan dokumen ini selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BKD - DIKLAT 2017 - 2022. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* juga berpedoman pada Renstra BKD - DIKLAT, sedangkan dalam hal pemanfaatan struktur ruang, penyusunan Rencana Kerja memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo.

Proses penyusunan Rencana Kerja BKD - DIKLAT dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja BKD-DIKLAT dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan BKD - DIKLAT untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD - DIKLAT sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja BKD - DIKLAT tahun lalu berdasarkan Renstra BKD - DIKLAT yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* menyusun Rencana Kerja BKD - DIKLAT Tahun Anggaran 2019.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah BKD-Diklat.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENCANA KERJA Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman BKD - DIKLAT dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan khususnya yang akan dilaksanakan tahun 2019.
- 2) Sebagai pedoman Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* dalam penyusunan RKA Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019
- 3) Sebagai tolok ukur Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2019.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan ***Bab Pendahuluan*** yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENCANA KERJA seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Merupakan ***Bab Hasil Evaluasi RENCANA KERJA Perangkat Daerah Tahun Lalu*** yang memuat Evaluasi pelaksanaan RENCANA KERJA Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPDP, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III** Merupakan *Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah* yang akan memuat Telaah terhadap kebijakan nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

**BAB IV** Merupakan *Bab Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah yang* memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan *Tahun 2019* dalam kurun waktu 2019

**BAB V** Merupakan *Bab Penutup*, yang memuat Catatan Penting, Kaidah-aidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut.

**LAMPIRAN :** Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-C.32 dan Tabel T-C.33



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 dan Capaian Renstra sebagai berikut :

- 1) Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah berupa kegiatan Bimtek AKD yang tidak dilaksanakan karena adanya Perkalan yang terkait AKD sehingga tidak terlaksana.
- 2) Untuk program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - a. terselesaikannya renovasi gedung dan bangunan gedung Diklat pada kegiatan pembangunan gedung kantor.
  - b. Terlaksananya diklat PIM IV, dapat dilaksanakan sesuai target yaitu sebanyak 40 orang pada kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah.
  - c. Terlaksananya diklat prajabatan bagi calon PNS Daerah, dapat dilaksanakan melebihi target yaitu sebanyak 128 orang pada kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah.
  - d. Tersalurnya bantuan tugas belajar pada kegiatan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dapat dilaksanakan sesuai target yaitu sebanyak 6 orang.
  - e. Terlaksananya kegiatan Bimtek/Sosialisasi penyelesaian sengketa kepegawaian dan perundangun dangan kegiatan proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS, dapat dilaksanakan sesuai target yaitu sebanyak 2 kali.

- f. Terlaksananya kenaikan pangkat otomatis PNS pada kegiatan penataan system administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, dapat dilaksanakan sesuai target yaitu sebanyak 2 (Dua) periode.
- g. Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah pada kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS, dapat dilaksanakan sesuai target yaitu sebanyak 72 orang.
- h. Terlaksananya penempatan PNS Daerah sebanyak 4 kali pada kegiatan Penempatan PNS.

Tabel T-C.29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019).

*Terlampir*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dokumen Renstra OPD Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan maka untuk Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan terdapat 2 (dua) jumlah sasaran sesuai dengan renstra OPD 2017-2022 indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2022). Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

### ***Sasaran 1***

Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih disertai penerapan e-government

Jumlah laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel pada BKD - Diklat pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 100% realisasi capaiannya adalah 95.84 %. Sedangkan perkiraan capaian (target) untuk tahun 2019 adalah 100% terserapnya anggaran.

### ***Sasaran 2***

#### ***Meningkatkan kualitas pelayanan public***

Persentase administrasi tertata dengan baik pada BKD-Diklat pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 100% realisasi capaiannya adalah 84.15 %. Sedangkan perkiraan capaian (target) untuk tahun 2019 adalah 100% terserapnya anggaran.

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pada BKD-Diklat pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 100% realisasi

capaiannya adalah 99.71 %. Sedangkan perkiraan capaian (target) untuk tahun 2019 adalah 100% terserapnya anggaran.

Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat PIM, diklat teknis dan diklat fungsional pada BKD - Diklat pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 100% realisasi capaiannya adalah 93.12 %. Sedangkan perkiraan capaian (target) untuk tahun 2019 adalah 100%.

Persentase indeks kepuasan pelayanan kepegawaian pada BKD - Diklat pada kondisi akhir periode renstra tahun 2017 ditargetkan sebanyak 100% realisasi capaiannya adalah 99.71 %. Sedangkan perkiraan capaian (target) untuk tahun 2019 adalah 100% indeks kepuasan pelayanan kepegawaian.

Tabel T-C.30 (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s/d Tahun 2019).

*Terlampir*

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi program antara Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan dengan lintas OPD baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi serta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara semua stakeholder, dimana kegiatan ini dilaksanakan berupa rapat koordinasi maupun rembuk OPD dengan lintas terkait yang telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya usulan program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan hasil aspirasi dari bawah yang kemudian dimasukan menjadi bahan usulan tahun berjalan maupun tahun akan datang.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan yaitu :
  - 1) Masih minimnya sarana dan prasarana kantor BKD-Diklat.
  - 2) Kurangnya jumlah aparatur/petugas yang menangani system informasi kepegawaian (SIMPEG).

- 3) Keterbatasan sumberdaya aparatur yang masih minim terhadap peraturan perundang – undangan kepegawaian dan kompetensi analisis penataan Aparatur Sipil Negara.
  - 4) Keterbatasan anggaran dalam mengembangkan system informasi kepegawaian.
  - 5) Masih banyak pejabat eselon yang belum mengikuti diklat penjenjangan.
3. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan yang telah diuraikan di atas, maka dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan misi pembangunan pada RPJMD 2017-2022 yaitu mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai (Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan).
  4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain: Perubahan peraturan dibidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap unit kerja. Dengan demikian komposisi pegawai yang ada, juga harus sesuai kebutuhan, maka komposisi pegawai dalam golongan/pangkat, pendidikan, jabatan menjadi persoalan kritis dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi.  
Adapun peluang sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap lembaga satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumberdaya manusia pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi. Dengan demikian pembangunan bidang kepegawaian akan dapat mewujudkan system manajemen yang mampu menghasilkan ASN yang professional yang didukung dengan system pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja.
  5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boalomo 2017 - 2022, sehingga Rencana Kerja BKD-Diklat Tahun 2019 juga merupakan Rencana Kerja ketiga dalam tahapan Renstra BKD-Diklat 2017-2022. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

*Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan Pelayanan Pemerintahan, untuk itu dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran OPD BKD-Diklat.*

Tabel T-C.31 (Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019). *Terlampir*

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil penelaahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih disertai penerapan e-government melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public diakomodir melalui program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Tabel T-C.32 (Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019). *Terlampir.*

untuk usulan kegiatan masyarakat tidak ada.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan Kementerian PANRB Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Visi : ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi”***

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

- 1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
- 2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
- 3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
- 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dari visi dan misi Kementerian PANRB, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian PANRB sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
- 2) Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
- 3) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
- 4) Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas
- 5) Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Dari Tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Kementerian PANRB, sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tetap Ukuran, dan Tetap Proses.



3. Terwujudnya Tatalaksana Pemerintahan yang Berbasis Elektronik.
4. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten.
5. Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompetitif.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
7. Meningkatnya Penerapan Sistem Integritas.
8. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
10. Terwujudnya Kementrian PANRB yang Efektif dan Efisien.
11. Terwujudnya Kementrian PANRB yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
12. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementrian PANRB yang berkualitas.

### 3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi Gubernur adalah : **“Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di-Provinsi Gorontalo”**. Penjabaran atas visi ini dirumuskan dalam 5 (lima) misi yakni ; pertama, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. Kedua, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. Ketiga mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Keempat, mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Serta kelima, menciptakan sinergitas diantara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

### **3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan 2017-2022, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **1) Tujuan**

Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan.

#### **2) Sasaran**

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih disertai penerapan e-government;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **3.4 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD 2017-2022 , dan rancangan awal RKPD 2019, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

#### **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Rehabilitasi Berat/sedang Gedung Kantor

#### **3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
- e. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
- f. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

#### **4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - a. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
  - b. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
  - c. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
  - d. Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
  - e. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
  - f. Seleksi Penerimaan calon PNS
  - g. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
  - h. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
  - i. Penempatan PNS

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan dalam kurun waktu 2019 sesuai target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana *terlampir*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa. *Sekian dan terimakasih.*

Tilamuta, Januari 2019

**Plt. KEPALA BADAN**

**AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si**

Pembina, IV/a

NIP. 19740314 200312 1 007

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019  
Kabupaten Boalemo

**Badan Kepegawaian Derah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2018
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian									
	Bidang Kepegawaian									
4 05 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase administrasi tertata dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
4 05 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	03	Pembangunan Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	100 %	200 %	200%
4 05 07 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat PIM, diklat teknis dan diklat fungsional	50 %	58.02 %	20.86 %	25.35 %	122%	40 %	123 %	247%
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	0 %	100 %	0 %	-	100 %	100 %	100%
	02	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	100 %	0 %	100 %	0 %	-	100 %	100 %	100%
	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	0 %	100 %	0 %	-	100 %	100 %	100%
	04	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	40 Orang	0 Orang	40 Orang	37 Orang	0.93	40 Orang	77 Orang	193%
	05	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	40 Orang	37 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	117 Orang	293%
	06	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	80 Orang	0 Orang	66 Orang	- Orang	0%	66 Orang	66 Orang	83%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%) 2017		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2018
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5++9)	11=(10/4)
4 05 07 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan/laporan akuntabilitas dan keuangan SOPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
4 05 07 07	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	94 Baik	85.63 Baik	90 Baik	90.15 Baik	100%	100 %	276 %	293%
	01 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah ASN Penerima Beasiswa	6 Orang	54 Orang	6 Orang	9 Orang	150%	6 Orang	69.00 Orang	1150%
	02 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Presentase ASN yang Berprestasi	100 %	0 %	100 %	0 %	0%	100 %	100 %	100%
	04 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Persentase data atau informasi kepegawaian yang cepat dan akurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	05 Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Persentase ASN yang indiscipliner	0.43 %	0 %	0.49 %	0.49 %	100%	0.49 %	0.98 %	228%
	06 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Persentase keputusan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian melalui peningkatan prosentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	07 Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah Dokumen yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan calon ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	4 Kegiatan	0 %	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
	10 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Persentase pembinaan karir PNS	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	300%
	11 Penempatan PNS	Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan Pemda Kab. Boalemo	100 %	0 %	100 %	0 %	0%	100 %	100 %	100%



No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (ttn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (ttn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Prosentase indeks kepuasan pelayanan kepegawaian		90 Baik	90 Baik	92 Baik	94 Baik	96 Baik	90.15 Baik	92.21 Baik	94 Baik	96 Baik	
1	Jumlah ASN Penerima Beasiswa		6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	9 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	
2	Presentase ASN yang Berprestasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0.00 %	0	100 %	100 %	
3	Persentase data atau informasi kepegawaian yang cepat dan akurat		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentase ASN yang indiscipliner		0.49 %	0.49 %	0.49 %	0.43 %	0.36 %	0.49 %	0.49%	0.43 %	0.36 %	
5	Persentase keputusan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian melalui peningkatan prosentase pelayanan administrasi kepegawaian		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
6	Jumlah Dokumen yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan calon ASN		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	0.00 Kegiatan	0 Keg	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
8	Persentase pembinaan karir PNS		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
9	Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan Pemda Kab. Boalemo		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	100 %	100 %	

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**  
**Provinsi Gorontalo**

**Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	6	7	8		5	6	7	8	13	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Boalemo	Persentase administrasi tertata dengan baik	100 %	283,340,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Boalemo	Persentase administrasi tertata dengan baik	100 %	994,960,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pelayanan administrasi kantor dan penunjang lainnya	100 %	163,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pelayanan administrasi kantor dan penunjang lainnya	100 %	830,960,000	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	100 %	120,340,000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	100 %	164,000,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Boalemo	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	480,540,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Boalemo	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	321,000,000	
3	Pembangunan Gedung Kantor		Persentase tersedianya gedung kantor	100 %	286,000,000	Pembangunan Gedung Kantor		Persentase tersedianya gedung kantor	100 %	321,000,000	
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Persentase bangunan/gdung/kantor yang memadai & representative	100 %	194,540,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Persentase bangunan/gdung/kantor yang memadai & representative	0 %	-	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Kabupaten Boalemo	Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat PIM, diklat teknis dan diklat fungsional	50 %	1,355,790,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Kabupaten Boalemo	Prosentase aparatur yang telah mengikuti diklat PIM, diklat teknis dan diklat fungsional	50 %	1,355,790,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Persentase aparatur dalam melaksanakan tugas dan salah satu persyaratan jabatan	100 %	50,790,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Persentase aparatur dalam melaksanakan tugas dan salah satu persyaratan jabatan	0 %	-	
2	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan		Persentase aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	50,000,000	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan		Persentase aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang - undangan	0 %	-	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Persentase Aparatur dalam melaksanakan dan meningkatnya jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat teknis	100 %	100,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Persentase Aparatur dalam melaksanakan dan meningkatnya jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat teknis	0 %	-	
4	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi sebagai salah satu persyaratan jabatan	40 Orang	330,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi sebagai salah satu persyaratan jabatan	0 Orang	-	
5	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah		Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat Struktural	40 Orang	400,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah		Jumlah Aparatur yang telah mengikuti diklat Struktural	0 Orang	-	
6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah		Jumlah calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan sebagai salah satu persyaratan menjadi PSN	80 Orang	425,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah		Jumlah calon PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan sebagai salah satu persyaratan menjadi PSN	178 Orang	1,807,765,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Boalemo	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	100 %	175,340,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Boalemo	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	100 %	175,340,000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan/laporan akuntabilitas dan keuangan SOPD	1 Dokumen	175,340,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Jumlah penyusunan dokumen perencanaan/laporan akuntabilitas dan keuangan SOPD	1 Dokumen	116,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1	2	6	7	8	1,780,250,000	5	6	7	8	13	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kabupaten Boalemo	Prosentase indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	94 Baik	1,780,250,000	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kabupaten Boalemo	Prosentase indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	100 %	729,650,000	
1	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas		Jumlah ASN Penerima Beasiswa	6 Orang	60,000,000	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas		Jumlah ASN Penerima Beasiswa	9 Orang	107,500,000	
2	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi		Presentase ASN yang Berprestasi	100 %	153,000,000	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi		Presentase ASN yang Berprestasi	0 %	-	
3	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		Persentase data atau informasi kepegawaian yang cepat dan akurat	100 %	253,000,000	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		Persentase data atau informasi kepegawaian yang cepat dan akurat	100 %	84,200,000	
4	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		Persentase ASN yang indisipliner	0.43 %	187,000,000	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		Persentase ASN yang indisipliner	0.43 %	78,500,000	
5	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS		Persentase keputusan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian melalui peningkatan prosentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	335,000,000	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS		Persentase keputusan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian melalui peningkatan prosentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	186,450,000	
6	Seleksi Penerimaan calon PNS		Jumlah Dokumen yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan calon ASN	1 Dokumen	302,000,000	Seleksi Penerimaan calon PNS		Jumlah Dokumen yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan calon ASN	0 %	-	
7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	4 Kegiatan	50,000,000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	0 Kegiatan	-	
8	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS		Persentase pembinaan karir PNS	100 %	76,000,000	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS		Persentase pembinaan karir PNS	100 %	45,000,000	
9	Penempatan PNS		Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan Pemda Kab. Boalemo	100 %	364,250,000	Penempatan PNS		Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan Pemda Kab. Boalemo	100 %	228,000,000	

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kabupaten Boalemo Gorontalo**

**Badan Kepegawaian Derah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	4	5	6	8
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian				
	Bidang Kepegawaian				

**TIDAK ADA USULAN**



**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2020**  
**Kabupaten boalemo**

**Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	xx xx xx xx	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian							
4	05 xx xx xx	Bidang Kepegawaian							
4	05 xx 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Boalemo	100 %	283,340,000	APBD		100 %	308,540,000
		03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	163,000,000			100 %	169,000,000
		18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		100 %	120,340,000			100 %	139,540,000
4	05 xx 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Boalemo	100 %	480,540,000	APBD		100 %	507,450,000
		03 Pembangunan Gedung Kantor		100 %	286,000,000			100 %	300,000,000
		22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100 %	194,540,000			100 %	207,450,000
4	05 xx 07 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Kabupaten Boalemo	50 %	1,355,790,000	APBD		60 %	1,380,000,000
		01 Pendidikan dan Pelatihan Formal		100 %	50,790,000			100 %	50,000,000
		02 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan		100 %	50,000,000			100 %	50,000,000
		03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100 %	100,000,000			100 %	100,000,000
		04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah		40 Orang	330,000,000			40 Orang	330,000,000
		05 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah		40 Orang	400,000,000			40 Orang	400,000,000
		06 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah		80 Orang	425,000,000			120 Orang	450,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
4	05	xx	07	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan akuntabel	Kabupaten Boalemo	100 %	175,340,000	APBD		1 Dokumen	200,540,000
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan/laporan akuntabilitas dan keuangan SOPD		1 Dokumen	175,340,000			1 Dokumen	200,540,000
4	05	xx	07	07	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	Kabupaten Boalemo	94 Baik	1,780,250,000	APBD		96 Baik	1,805,500,000
				01	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah ASN Penerima Beasiswa		6 Orang	60,000,000			6 Orang	60,000,000
				02	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Presentase ASN yang Berprestasi		100 %	153,000,000			100 %	155,000,000
				04	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Persentase data atau informasi kepegawaian yang cepat dan akurat		100 %	253,000,000			100 %	255,000,000
				05	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Persentase ASN yang indiscipliner		0.43 %	187,000,000			0.36 %	190,000,000
				06	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Persentase keputusan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian melalui peningkatan prosentase pelayanan administrasi kepegawaian		100 %	335,000,000			100 %	340,000,000
				07	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah Dokumen yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan calon ASN		1 Dokumen	302,000,000			1 Dokumen	305,000,000
				09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		4 Kegiatan	50,000,000			4 Kegiatan	50,000,000
				10	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Persentase pembinaan karir PNS		100 %	76,000,000			100 %	77,000,000
				11	Penempatan PNS	Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan Pemda Kab. Boalemo		100 %	364,250,000			100 %	373,500,000